

POLITISASI IDEOLOGI DALAM LINTASAN SEJARAH

A BRIEF HISTORY REPORT OF IDEOLOGY POLITICISATION

Margriet Moka-Lappia

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin
Jl.Perintis Kemerdekaan Km. 10
Kampus Tamalanrea –Makassar, Sulawesi Selatan
E-mail:margie_ml@yahoo.com

A. Lili Evita

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin
Jl.Perintis Kemerdekaan Km. 10
Kampus Tamalanrea –Makassar, Sulawesi Selatan
E-mai:alilievita@unhas.ac.id

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2019, Naskah direvisi tanggal 8 September 2019, Naskah disetujui tanggal 2 Oktober 2019

Abstrak

Een Kwestie Van Macht (persoalan kekuasaan) karya Anthony Van Kampen, mengisahkan riwayat dr. L.J.A. Schoonheydt yang mengalami perubahan nasib yang drastis akibat politisasi ideologi setelah menulis bukunya *boven digoel*. dokter ahli penyakit tropis di tanah jajahan Hindia Belanda yang berkariyer gemilang, dihormati serta hidup mapan ini, menjadi tahanan politik tanpa prosedur yang normal. ia ditawan sejak 1940 dan saat Belanda menyerah di tahun 1942, diberangkatkan ke Suriname, dan baru dibebaskan kembali tahun 1946. penuh perjuangan dan untuk waktu yang lama, Schoonheydt mengusahakan rehabilitasi namanya. Chalid Salim, adik Agus Salim, yang berjuang untuk kaum tertindas dan dibuang Belanda mengalami nasib yang tak jauh berbeda. nasib dan perlakuan penahanan sebagai dampak politisasi ideologi juga dialami banyak orang di tahun 1965 dengan pecahnya G30S. ada yang memang bersimpati dan aktif dalam organisasi politik PKI, namun ada juga yang hanya mendaftar dalam suatu organisasi berorientasi komunis untuk mengikuti kegiatan seni menyanyi atau menari. ini nyata dari kesaksian dalam acara Kick Andy Show tanggal 3 Mei 2019 yang menginterview ibu-ibu mantan tapol yang menjadi korban penahanan tanpa prosedur pengadilan. mereka masih mengharapkan rehabilitasi nama mereka. di masa kini istilah politisasi ideologi kembali terdengar. pihak yang ditangkap merasa dizalimi dan menuduh penguasa melakukan kriminalisasi. sebaliknya pihak penguasa menyatakan menjalankan kewajibannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. melalui metode heuristik dan analisis wacana peristiwa-peristiwa ini akan direkonstruksi dan dianalisis dimana akan diperlihatkan betapa kondisi politik dan kebijakan penguasa, dipengaruhi rumor media, dapat membuat sejumlah orang tak bersalah menjadi korban politisasi ideologi.

kata kunci: kekuasaan pemerintah, politisasi ideologi, kriminalisasi, boven digul, tapol PKI

Abstract

Een Kwestie van Macht (A Matter of Power), a book written by Anthony van Kampen, tells about a drastic life change experienced by dr. L.J.A. Schoonheydt, due to the ideology politicisation after his book '*boven digoel*' was published (in 1936). A well-known doctor, a specialist in tropical disease, who has glorious career in Dutch East Indies, had become a political prisoner in a blink of an eye without a proper legal procedure. Schoonheydt was detained in Dutch East Indies prison camps since 1940, sent as prisoner to Suriname when Dutch-Indies surrendered to Japan in 1942. In 1946 he got back to Netherland. It takes a long road and full of struggle for Schoonheydt to restore his good name and image. Chalid Salim, the brother of Agus Salim, was prisoner of Boven Digul and experienced a

similar situation. Change of fate and treatment of detention as an effect of the ideology politicisation also experienced by many people in 1965 in the case of G30S. There were people who joined the Indonesia Communist Party (PKI) as active politic members, but there were also people who were registered to an affiliate organization of the PKI only to join the artistic activities like dancing and singing. This is a testimony of Dialita Choir members on Kick Andy Show, a talk show program, broadcast on 3rd May 2019. who are ex-political prisoners detained without legal procedures. They are still hoping to restore their good name. In the present, the politicisation of ideology is heard again. The arrested party feels molested, and accused that the government has been doing politic criminalization. On the other hand, government stated that they carry out their obligations in accordance with applicable legal procedures. Through historical method and text analysis, these events were reconstructed and analyzed. It shows how politic conditions and ruler's policy, influenced by media rumors are able to make some innocent people became victims of ideology politicisation.

keywords: government power, ideology politicisation, criminalisation, Boven Digul, politic prisoners

PENDAHULUAN

Ideologi sering kali dijadikan sebagai simbol kekuasaan yang dapat digunakan dalam menarik massa, atau menjadi pembatas pembeda antara orang seorang. Olehnya perbedaan ideologi juga dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan atau mengeliminasi seseorang dari lingkaran kekuasaan di tengah masyarakat. Pertarungan yang terjadi antarkaum elit, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, menjadi wujud gambaran adanya lapisan penguasa yang berpotensi menimbulkan mobilitas kekuasaan pada lapisan sosial masyarakat. Ini dapat mengakibatkan adanya konflik laten yang berakar kepada sejarah masa lalu, dan berujung kepada ketidaksiapan salah satu elite politik untuk menerima golongan lainnya. Konflik kepentingan ini terkadang berdampak pada orang-orang yang dianggap mengancam kedudukan dan kondisi para elit penguasa, bahkan terkadang dimanfaatkan guna melindungi dan menyelamatkan diri dari jeratan persoalan yang terjadi.

Ideologi menurut KUBI (Purwadarminta, 1985:369) diartikan sebagai 'asas pendapat (keyakinan) yang dipakai (dicitakan) untuk dasar pemerintahan, dsb.' Secara umum dapat dikatakan bahwa ideologi adalah asas cita-cita yang ingin dicapai melalui suatu paham pemikiran yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, lima asas kehidupan berbangsa yang diyakini dapat mempersatukan dan

menyejahterakan bangsa Indonesia menuju kebahagiaan bersama. Namun jika kita membahas jaman kolonialisme, maka dapat dikatakan bahwa cita-cita bangsa Belanda dalam menguasai wilayah koloni di Hindia Belanda, terutama bertujuan untuk menggali potensi wilayah nusantara untuk kepentingan dan kesejahteraan negara induk, tanpa adanya ancaman atas 'rust en orde', keamanan dan ketertiban. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut, pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem politik pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Aristoteles (384-322 sM) menyatakan manusia bersifat 'zoon politikon' (manusia hidup berpolitik), yaitu bahwa dalam menentukan posisinya di tengah masyarakat untuk meraih kesejahteraan pribadinya, manusia berusaha mempengaruhi orang lain mengenai pendapat pribadinya agar menerima pandangan-pandangannya. Itu semua menunjukkan bahwa ia adalah makhluk yang melakukan interaksi politik dan sosial dalam ruang lingkup dan konteks masyarakat/negara. Kehidupan politik lazim dikaitkan dengan kekuasaan negara (*power*) dan kewenangan (*authority*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan umum (*public policies*), pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber (*sources*) yang ada. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang berproses menentukan tujuannya dan

melaksanakannya. Cara-cara yang dilakukan dapat bersifat persuasif, dengan berusaha meyakinkan, namun dapat juga bersifat paksaan (*coercion*), sedangkan jika dilakukan tanpa unsur paksaan, proses itu hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa politik berarti upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki bersama, suatu tujuan yang bersifat umum (*public goals*), bukan keinginan pribadi.

Baik dalam pemahaman politisasi agama ataupun birokrasi, terkandung dua hal pokok, yaitu bahwa tujuan politisasi umumnya bersifat negatif, dan selalu berkaitan dengan masalah mempertahankan kekuasaan. Politisasi umumnya dimaknai sebagai manipulasi politik, yaitu menggunakan politik untuk menangani suatu permasalahan dengan cara-cara yang tidak lumrah dan cenderung negatif, untuk mempertahankan kekuasaan.. Sehingga pengertian politisasi ideologi dapat diartikan sebagai penggunaan politik (oleh penguasa) untuk menangani pandangan ideologis yang berkembang dalam masyarakat suatu negara dengan cara-cara ‘khusus’ untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan.

KAJIAN PUSTAKA

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan sebagai ‘suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama’ (*power is a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former's own ends*) (Budiardjo, 2018:60). Sekalipun pemaksaan terhadap suatu ideologi yang hakekatnya bersifat pemikiran/rohaniahtidak dapat bersifat mutlak, namun akibat tekanan fisik, ekonomis atau politis oleh penguasa,seringkali korbannya terpaksa harus patuh dan memperlihatkan persetujuan pendapat.

Dalam dunia politik, pihak penguasa/pemerintah pada dasarnya menjalankan dan memanfaatkan sistem politik, kekuasaan dan kewenangannya untuk

mewujudkan cita-cita/ideologi dan tujuan negara yang dipimpinnya, dan ketika ada pihak-pihak yang cenderung menghalangi atau berusaha membelokkan usaha mewujudkan cita-cita tersebut, maka pemerintahpun akan menggunakan segala kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk tetap dapat memegang kendali atas situasi yang ada. Jika hal ini terkait dengan ideologi berbeda yang sedang berkembang dan dianggap mengancam warga negara yang lain, maka para pelaku ini akan berusaha dijauhkan dari masyarakat umum, dengan melakukan penangkapan dan penyekapan, atau dengan pengasingan ke lokasi yang jauh/terpencil dengan tujuan mencegah terjadinya komunikasi dengan pihak-pihak lain. Dalam penelitian yang kami lakukan terlihat bagaimana politisasi ideologi ini terjadi dari masa ke masa dalam bentuk dan konteks yang berbeda, dengan usaha penanganan yang serupa, tapi dapat juga dengan cara yang berbeda. Gejala inilah yang terlihat pada masa kini, yaitu bagaimana pemerintah berusaha menangani permasalahan yang ada secara legal hukum, sementara selama ini tindakan yang dilakukan seringkali bersifat melanggar hukum.

Kosasih Djahiri (dkk) dalam *Ilmu Politik dan Kenegaraan* menyatakan bahwa ilmu politik melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, yang melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur terpenting dalam politik berkaitan dengan unsur kekuasaan, dan jika kekuasaan itu dijalankan sesuai tatanan yang berlaku, maka hal ini dapat didefinisikan sebagai kewenangan, sehingga politik adalah bagaimana kekuasaan dan kewenangan ini digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

KBBI versi *on-line* mengartikan politisasi sebagai ‘hal membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis’. Sejauh ini, kata politisasi digunakan untukistilah ‘politisasi agama’ dalam arti radikalisasi agama, serta ‘politisasi birokrasi’, dalam arti:

‘membuat agar birokrasi bekerja dan berbuat (dalam arti taat dan patuh) sesuai

dengan kepentingan politik yang berkuasa. Politisasi birikrasi berada di dua sisi; berasal dari partai politik yang mengintervensi birokrasi, atau dari eksekutif itu sendiri yang mempolitisir birokrasi untuk kepentingannya (kekuasaan) sendiri. Tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu melanggengkan atau mempertahankan kekuasaan' (Rambe, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama berupa pengumpulan materi maupun sumber terkait topik politisasi ideologi Saat ini komunisme secara resmi telah dilarang, namun politisasi ideologi masih tetap berlangsung, misalnya terkait kepercayaan dan cita-cita mendirikan negara khilafah yang tidak mengakui dasar-dasar ideologi negara NKRI Pancasila. Dalam perjalanan untuk mewujudkan ideologi dan cita-cita, muncul konflik dan perseteruan di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan, dan pihak penguasa akan berusaha mengatasi konflik tersebut, apakah melalui jalan damai dengan memberikan opsi dan pemahaman, usaha menempuh kesepakatan, hingga mengeluarkan peringatan, ancaman, peraturan dan tindakan yang bersifat keras dan tegas dengan melakukan penangkapan dan penahanan, entah yang melakukan tersebut bersalah atau tidak.

Beberapa sumber primer yang digunakan diantaranya *Een Kwestie van Macht* (Persoalan Kekuasaan) karya Anthony van Kampen, *Penulisan Sejarah Boven Digoel, buku satu: perpektif sejarah*, khususnya bab I, II dan V, *Limabelas Tahun Digul, Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea, Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, yang ditulis Chalid Salim, acara *Kick Andy Show* tanggal 3 Mei 2019 dengan ibu-ibu anggota Paduan Suara "Dialita", serta buku *Gerwani. Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan* karya A.D. Lestariningsih, serta sumber berita *on-line* untuk peristiwa masa kini.

Tahapan kedua dilakukan kritik sumber, mana sumber yang representatif digunakan dalam membuktikan terjadinya

politisasi ideologi oleh pemerintah yang berkuasa secara tidak lazim terhadap mereka yang memiliki ideologi yang berbeda dari pemerintah/negara. Tahapan ketiga, interpretasi, dimana materi yang dikumpulkan dan diseleksi kemudian dianalisis data dan faktanya, serta diinterpretasi atas konteks yang menyertai fakta dan data tersebut. Di samping itu, dilaksanakan metode analisis wacana, khususnya terhadap pernyataan-pernyataan langsung yang berupa tulisan dari suatu media tulis ataupun diucapkan lisan dalam video dari media on-line/TV.

Data penelitian yang bersifat kualitatif ini kemudian disusun dalam suatu kerangka pikir yang utuh sesuai dengan thema yang telah dipilih. Tahap terakhir disebut *historiografi*, berupa penulisan hasil analisis yang telah dilakukan, disusun secara sistematis dan kronologis dalam tulisan yang bersifat deskriptif kualitatif, karena ingin menggambarkan secara sistematis dan faktual sejumlah fakta, fenomena serta hubungan antar fenomena yang diteliti terkait politisasi ideologi. Dalam tulisan ini akan dibandingkan situasi abad lalu di tahun duapuluhan dan enampuluhan, serta situasi di masa kini.

PEMBAHASAN

Louis Johan Alexander (Lex) Schoonheydt lahir di Magetan pada 8 Juni 1903 di Madiun dan dibesarkan di Hindia Belanda hingga waktunya bersekolah di negeri Belanda. Lex memilih studi kedokteran melalui beasiswa negara yang mewajibkannya menjadi perwira kesehatan KNIL, dan setelah menyelesaikan studinya di GU-Amsterdam pada 10 Desember 1930, ia diangkat menjadi letnan satu di KNIL, dan berangkat ke Batavia untuk bertugas. Dokter yang cerdas, pekerja keras dan berjiwa sosial ini kemudian mengambil spesialisasi penyakit tropis, khususnya pemberantasan penyakit malaria. Dari tahun 1932 hingga akhir tahun 1934 ia ditugaskan sebagai dokter pemerintah di kamp Boven Digoel di tanah Papua. Semula ia menganggap tugasnya sebagai hukuman, pembuangan, namun ia kemudian menikmati keberadaannya di sana, mengabdikan banyak berbuat. Ia bergaul dengan semua kalangan, dan sangat perhatian kepada nasib para

tahanan, orang-orang buangan. Periode 1934-1937 sangat penting bagi hidup dan karier Schoonheydt. Setelah kembali ke Batavia, Schoonheydt menikah tahun 1936, menyelesaikan dissertasinya (Kampen, 1975:145) dan dipromosikan di Batavia tahun 1937. Ia semakin berprestasi dan terkenal di seluruh Hindia Belanda. Schoonheydt tahun 1936 juga menyelesaikan dan menerbitkan karyanya yang terkenal: *Boven Digoel*. Isinya menceritakan pengalamannya selama dua tahun di Boven Digoel dan pandangannya mengenai status, sifat dan sistem penahanan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap beberapa ribu orang yang dianggap memiliki ideologi dan pemahaman politik yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Umumnya mereka adalah tahanan yang ditangkap dari pemberontakan PKI di Banten dan Silungkang di tahun 1926/1927. Di Boven Digoel ia berkenalan dengan Chalid Salim, wartawan dan tokoh pergerakan kemerdekaan berhaluan kiri, adik Haji Agus Salim, yang dihukum karena mengkritik pemerintah. Resensi terhadap *Boven Digoel* umumnya positif, namun ada juga yang kritis. Buku ini mendapatkan sorotan dari a.l. penulis terkenal E. Du Perron yang berganggapan bahwa karena jujur, karya ini menjadi kritik terhadap sikap pemerintah Belanda dalam menjalankan politik kolonialnya. Di tahun 1936 Schoonheydt menjadi anggota NSB (Organisasi Nasional-Sosialistis)-Hindia Belanda, dan tetap menjadi anggota selama 4 tahun. Van Kampen menyatakan:

“sama halnya dengan dewa-dewa yang membutuhkan orang yang akan dihancurkannya, NSB telah membutuhkan Schoonheydt, yang sama sekali tidak sadar, bahwa dengan menjadi anggota NSB ia telah membuat kesepakatan dengan iblis, dan bahwa ia kini berada di jalan nestapa, terjebak, tanpa jalan keluar. Vonis telah dijatuhkan, hanya saja saat itu ia belum tahu.” (1975:142).

Schoonheydt sendiri sekalipun bersikap kritis terhadap kondisi kehidupan sosial politik di masyarakat, namun pada dasarnya ia tidak berpolitik praktis. Tahun 1937 Schoonheydt cuti besar setahun untuk pulang ke Belanda.

Melalui berbagai publikasinya, nama Schoonheydt telah terkenal di negeri Belanda, dan ia diundang untuk berbicara oleh sejumlah lembaga pemerintah dan swasta terkenal, termasuk NSB-Belanda. Beberapa kali terjadi bahwa setelah Schoonheydt berkisah tentang Boven Digoel, Soekaesih, mantan tahanan Digoel yang lain, diundang pihak berbeda, untuk membuat seminar tandingan. Soekaesih bersama tokoh NSB, Van Munster bahkan mempublikasikan suatu brosur berjudul: *‘Indonesie, een Politiestaat – een antwoord aan dr. Schoonheydt’* (= Indonesia, sebuah negara polisi – jawaban kepada dr. Schoonheydt) bersama dengan tokoh NSB. Schoonheydt menyadari adanya suatu ‘gerakan’ komunis, dan karena itu ia pergi ke kantor pusat NSB di kota Utrecht, untuk membatalkan keanggotaannya. Namun ketika di sana ia bertemu dan berdiskusi dengan Van Munster yang pernah mengkampanyekan NSB di Hindia Belanda, ia berhasil diyakinkan bahwa NSB memiliki visi-misi yang baik dan murni untuk kepentingan Belanda, sehingga ia tidak jadi membatalkan keanggotaannya (Kampen, 1975: 142-148).

Schoonheydt tiba kembali di Batavia, dan diangkat Kementerian Kesehatan Masyarakat menjadi dokter kepala wilayah pelabuhan Tanjung Priok, karena pelabuhan terbesar di Hindia Belanda ini sedang dilanda wabah malaria. Kondisi keuangannya sangat baik, terlebih karena banyak jabatan sampingan diluar jabatan resminya. Tanggal 15 Juli 1939 ia dan tim kerjanya dianugerahi penghargaan untuk kerja kerasnya di pelabuhan, dimana dalam pidatonya ia tak menyembunyikan keanggotaannya sebagai anggota partai NSB. Kesuksesan dan keanggotaannya dalam partai ini menjadi bahan perbincangan di masa selanjutnya. Pada tanggal 22 April 1940, Schoonheydt dipanggil menghadap kepala Dinas Kesehatan Masyarakat. Dalam pertemuan itu hadir pula P. I. Idenburg yang saat itu menjabat sebagai kepala Departemen Pendidikan dan Agama. Schoonheydt diminta untuk dalam waktu yang sesingkat mungkin menarik diri dari keanggotaannya di partai NSB.

Schoonheydt menyatakan kepentingan negara harus selalu diutamakan, dan keesokan harinya (23 April 1940) ia langsung menarik diri dari NSB dan tidak pernah lagi berhubungan dengan partai tersebut. Pada tanggal 10 Mei, Jerman masuk ke wilayah Belanda dan mendudukinya. Sejak itu semua pegawai pemerintah dan militer, dan kemudian juga masyarakat awam, dilarang menjadi anggota partai NSB, yang merupakan partai yang didirikan Hitler. Sekalipun telah melepas keanggotaannya, tampaknya media tidak bersedia mendiagnosis pribadi Schoonheydt yang oleh redaktur utama *Java-Bode* H.C. Zentgraaff, tokoh besar jurnalistik Hindia Belanda, mempertanyakan bagaimana seorang dokter pelabuhan yang memiliki ide nasional-sosialistis dapat dipertahankan memiliki jabatan begitu tinggi. Schoonheydt terpukul oleh artikel ini, bukan saja karena isinya, tetapi karena Zentgraaff telah bertahun-tahun menjadi teman baiknya. Mulai saat itu Schoonheydt seperti terseret putaran arus tuduhan yang deras terkait keanggotaannya dalam NSB, yang diperkuat dengan pandangannya selama ini yang terkadang kritis terhadap kebijakan politik kolonial Belanda. Dia mulai ditolak dan dijauhi di berbagai organisasi dan kumpulan. Apapun jasa dan kebaikan yang ia buat, tidak lagi memperoleh penghargaan semestinya. Schoonheydt sadar bahwa ia kini merupakan orang yang dicurigai pemerintah sebagai antek NSB-Jerman, sekalipun sempat menyelamatkan penduduk saat serbuan tentara Jepang masuk ke Priok. Ia dituduh sebagai mata-mata Jepang, padahal dia sering memperingatkan pemerintah akan ancaman mata-mata Jepang (Kampen, 1975: 162-163).

Pada tanggal 10 Mei 1940, pada hari Jerman masuk dan menduduki negeri Belanda tersebut, Gubernur Jendral Tjarda van Stakenburg berpidato di radio untuk menenangkan masyarakat Hindia Belanda, bahwa aparat pemerintah siap menjaga keamanan dan ketertiban di Hindia Belanda. Ketika Schoonheydt siang itu meninggalkan sentra kesehatan di pusat kota, ia melihat bahwa aparat telah turun ke jalan, menyiapkan pagar kawat berduri, pos penjagaan, dan sebagainya, serta ada sejumlah

orang Jerman yang dinaikkan ke atas truk tentara bak terbuka, sebagian bahkan dengan baju renang atau pakaian seadanya. Tiba di kompleks pelabuhan ia melihat wanita-wanita Jerman yang sedang dilanda panik, dan bagaimana orang-orang Jerman ditangkap, dipukul dan ditendang, semuanya itu bahkan di hadapan orang-orang pribumi yang semula harus menganggap orang-orang Eropa berasal dari kasta yang lebih tinggi.

Namun, dengan pengkhianatan negara Jerman terhadap negeri Belanda, pandangan dan hukum yang semula itu tidak berlaku lagi. Ini saatnya balas dendam. Yang tidak disadari Schoonheydt adalah bahwa tak lama setelah tiba di rumah, kepala komisar kepolisian Batavia, De Witte datang ke rumahnya untuk melakukan panahan terhadap dirinya. Penangkapan ini dapat terjadi sesuai dengan undang-undang Hindia (*Indische Staatsregeling*) 1925 pasal 37 ayat 1 yang memberi hak Gubernur Jendral untuk menangkap dan mengekstradisi dengan alasan keamanan. Schoonheydt menghubungi jaksa agung mempertanyakan penangkapannya, tetapi ternyata jaksa agungnya juga ditangkap. Dia digiring ke Taman pelabuhan dimana sudah banyak tahanan lain dikumpulkan. Enam tahun tiga bulan kemudian, baru Schoonheydt dapat bersatu kembali dengan keluarganya (Kampen, 1975:172-174).

Schoonheydt dikumpulkan dengan para tahanan Jerman dan Eropa lainnya, dan di bawa ke pulau Onrust di kepulauan Seribu. Kehidupannya sebagai tahanan dimulai. Mandi beramai-ramai di ruang terbuka, tidur di lantai, makanan dijatah, bertugas mengangkat air, kayu bakar, serta diperlakukan kasar, sungguh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Yang paling memalukan baginya adalah mereka dijaga prajurit pribumi lengkap dengan klewangnya. Dengan uang yang masih dimilikinya Schoonheydt berusaha mencari jalan keluar bagi dirinya. Ia sempat berpikir untuk melarikan diri, namun kemudian berusaha mencari jalan resmi, meminta petugas mengirim telegram kepada Gubernur Jendral (hingga dua kali). Sempat ada petugas yang mengunjunginya, namun tetap sia-sia.

Dalam situasi sebagai tahanan ini dia teringat kepada para tahanan di kamp Boven Digoel, dan apa yang ditulisnya kemudian, bahwa orang Belanda tidak akan pernah memperlakukan tahananannya dengan kasar dan di luar prosedur hukuman. Namun ternyata dia sebagai orang Belanda, juga orang Eropa lainnya, ditahan dan diperlakukan di luar aturan hukum oleh pemerintahan kolonial yang selama ini dibelanya. Dari pulau Onrust, Schoonheydt dipindahkan dengan kapal ke kamp tahanan di Ambarawa.

Schoonheydt selalu berusaha memperjuangkan kebebasannya, atau mencari kesempatan melarikan diri. Semakin lama Schoonheydt semakin sadar, sebagai ex-NSB nasibnya telah ditentukan. Pada tanggal 14 November 1940, Schoonheydt dipindahkan ke kamp di Ngawi, yaitu kamp bagi orang-orang yang dianggap paling berbahaya. Schoonheydt dan beberapa teman berhasil melarikan diri, bahkan berhasil mencapai kota Batavia. Dari persembunyiannya Schoonheydt berusaha mengadukan kondisinya dengan menulis rekes kepada Gubernur Jendral Tjarda. Gagal. Setelah bertemu istri dan anaknya, ia dikembalikan ke Ngawi. Tanggal 21 Januari 1942, Schoonheydt dibawa ke Tanjung Perak, Surabaya dan dinaikkan ke kapal *Cisedane*, karena Jepang sejak 7 Desember 1941 Jepang telah mengumumkan perang, serta saat itu mulai masuk ke perairan Indonesia. Para tahanan di kapal *Cisedane* ditempatkan dalam kerangkeng besi dan pasrah kepada nasib, karena kapal-kapal Jepang dan Jerman siap menyerang mereka. Beruntung pada 1 Maret 1942 kapal tiba di Suriname dengan selamat.

Para tahanan dalam kondisi buruk dan sangat lemah menuju Leonsberg di muara sungai Suriname. Schoonheydt tinggal di penjara Nieuw-Amsterdam selama kurang lebih setengah tahun. Darisana ia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan di Paramaribo, Fort Zeelandia. Kepala penjara Fort itu sangat baik, tetapi kemudian datang para marinir sebagai penjaga lepas, dan para tahanan menjadi bulan-bulanan mereka. Dua tahanan ex-NSB dibunuh pemimpin marinir di sana yang ternyata juga seorang bekas NSB. Schoonheydt sendiri nyaris menjadi korban.

Para tahanan yang masih hidup dipindahkan ke Joden Savanna, suatu hutan 50 km di selatan Paramaribo. Di sana para tahanan harus bekerja, menebang dan mengangkut batang pohon, namun juga bebas berenang di sungai. Suasana di sana mengingatkan Schoonheydt akan kamp Boven Digoel. Pengamanannya lebih longgar, tetapi sungainya penuh piranha dengan rimba lebat yang dihuni suku Indian. Di sana Schoonheydt diijinkan berpraktek sebagai dokter, sekalipun peralatan medisnya kurang memadai.

Setelah perang dunia kedua usai, mereka dibebaskan dari kamp tahanan, dan pada 2 Agustus 1945 Schoonheydt tiba kembali di negeri Belanda. Segera Schoonheydt menulis surat kepada Ratu Julianadan parlemen Belanda minta direhabilitasi, karena ia masih tetap diperlakukan diskriminatif dalam masyarakat. Berulangkali permohonannya ditolak. Akhirnya Schoonheydt bermohon kepada pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu masih bercokol di Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 1949 akhirnya ia menerima surat dari Wali Kerajaan Belanda di Hindia Belanda, suatu surat pemberhentian kerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berhak dan wajib diberikan proses rehabilitasi. Kampen yang pernah pergi ke Digul kebetulan bertemu Schoonheydt di rumah sakit saat ia dirawat, dan meminta kesediaan untuk ditulis riwayat hidupnya. Buku *Een Kwestie van Macht* karya Anthony van Kampen terbit di tahun 1975, tak lama sebelum Schoonheydt meninggal.

Chalid Salim, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia berhaluan kiri, lahir pada tanggal 24 November 1902 di Tanjung Pinang. Setelah lulus sekolah MULO di Weltevreden, Batavia, ia bekerja dan mulai rajin menulis. Mula-mula di mingguan *Halilintar* di Pontianak, dan kemudian menjadi wartawan dan redaktur *Pewarta Deli* di Medan. Tulisannya banyak mengecam kebijakan kolonial a.l. terkait *poenale sanctie*, yaitu hak pemilik perkebunan untuk menghukum para kuli dengan hukuman fisik dan pemberian denda, tanpa melalui pengadilan. Ketika kemudian diketahui bahwa ia merupakan aktivis PKI, Chalid yang adalah

adik kandung Haji Agus Salim ini kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Medan pada tahun 1927. Ia kemudian dibuang ke Kamp Boven Digoel bersama para pemberontak PKI tahun 1926/1927. Chalid termasuk penghuni terlama di kamp Digul; ia tinggal di sana selama 15 tahun (1928-1943).

Pada tahun 1942 Chalid Salim meninggalkan faham atheis yang dianutnya, untuk dibaptis dan memeluk agama Katolik, serta diberi nama Ignatius Franciscus Michael Salim. Ketika Jepang masuk, ia diasingkan ke Australia, dan dari sana ia ke negeri Belanda untuk menetap di sana. Salim menikah, memproses rehabilitasi nama baiknya, serta menulis memoirnya yang berjudul: *Limabelas Tahun Digul, Kamp konsentrasi di Nieuw Guinea, tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*. Chalid yang dalam masa tahanannya di Boven Digul awalnya ditempatkan di kamp Tanah Tinggi, namun karena sakit dipindahkan ke Tanah Merah, dan bekerja di rumah sakit dr. Schoonheydt dan menjadi teman. Di Belanda kemudian mereka bertemu dan berteman kembali; mereka senasib walau berbeda: keduanya bekas tahanan politik, diperlakukan tidak adil dan bermohon rehabilitasi; keduanya telah mengalami transformasi kehidupan serta berubah pandangan hidup. Chalid meninggal di Belanda pada tanggal 10 Maret 1985.

Tapol wanita (data dari video acara *Kick Andy Show* 3 Mei 2019), anggota paduan suara *Dialita*, penyintas G30S dan keturunannya. Ibu Moedjiati dipenjara selama 14 tahun sejak usia 17 tahun. Ia ditangkap, dibawa ke koramil, lalu ke kodim di belakang Bank Indonesia., kemudian dipenjarakan di penjara perempuan Bukit Duri. Sebelumnya Moedjiati menjadi anggota *Pemuda Rakyat*, untuk mengikuti kegiatan paduan suara, dan tidak pernah terlibat dalam politik. Ia baru ikut di bulan Mei 1965, namun setelah G30S langsung dipenjara tanpa prosedur hukum. Ayahnya yang PNS juga ditangkap tapi tidak lama. Namun setelah keluar, ia kehilangan pekerjaan, dipecat dengan tidak hormat. Moedjiati dituduh menari dan menyilet para jenderal bersama para gerwani. Ibu Utati masuk penjara, umur 22 tahun. Sebelumnya ia bekerja sebagai guru SD, sementara ia sendiri

bersekolah di SLTA. Ia menjadi anggota *Pemuda Rakyat* tanpa mengetahui latar belakang politik organisasi ini, sekedar karena ingin ikut kegiatan di bidang kesenian. Utati ditangkap dengan alasan mau dimintai keterangan, ini berlangsung 3 hari, namun kemudian ditahan selama 11 tahun di penjara Bukit Duri. Ia ditahan tanpa proses hukum, namun berusaha bertahan karena tidak mau mati di situ. Saat pulang setelah 11 tahun, disambut orang tua dengan mengatakan: "Wah anakku yang sudah mati hidup kembali. Di usia 33 tahun dipulangkan, dan kemudian menikah dengan Gusalah Ananta Toer, adik Pramodya. Mencari pekerjaan waktu itu menjadi sulit, masyarakat dilarang menerima mereka. Ibu Tati kini sudah ikhlas. Ibu Irinabersaksi bahwa PS Dialita didirikan untuk para penyintas. Mereka melakukan kerja sosial dengan menjual baju bekas, lalu terinspirasi mendirikan paduan suara untuk membantu para sesepuh kelompok penyintas.

Asvi Warman Adam, seorang ilmuwan LIPI yang saat ini melakukan penelitian sejarah dalam rangka pelurusan bagian-bagian sejarah orde lama dan orde baru yang selama ini diputarbalikkan, menyatakan bahwa diluar negeri ada ribuan orang yang dicabut kewarganegaraannya hingga tidak bisa pulang selama puluhan tahun. Situasi mereka sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, sehingga seharusnya terjadi pelurusan sejarah dan rehabilitasi, terutama bagi mereka yang dipenjara tanpa prosedur hukum.

Ancaman laten PKI yang didengungkan pemerintah Orde Baru yang telah mengambil alih kekuasaan pemerintahan Orde Lama dibawah presiden Sukarno, menyebabkan terjadinya aksi "pembersihan" oleh pemerintah di bawah presiden Suharto selama bertahun-tahun. Ideologi komunis yang tidak sejalan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila dilarang, semua lembaga yang pernah berafiliasi dengan PKI dibubarkan, dan semua orang yang dianggap pernah terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan dengan organisasi atau anggota PKI, semuanya "diamankan" melalui berbagai cara, selama didapati masih hidup.

Kelompok kedua yang dibahas di sini adalah tahanan kamp Plantungan, Kendal, Jawa Tengah. Para wanita ini dianggap terlibat dalam organisasi wanita terbesar saat itu: Gerwani, atau afiliasi PKI lainnya, seperti HIS (Himpunan Sarjana Indonesia), Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat), yang dianggap merupakan organisasi wanita dari kalangan seniman dan akademisi yang memiliki pengetahuan dan pandangan yang cukup luas, dan karena itu dianggap berbahaya dalam mempengaruhi masyarakat, dan digolongkan ke dalam tapol B.

Dr. Sumiyarsi adalah contoh tapol B dari kamp Plantungan yang dahulunya anggota HSI, dan adalah istri dari CC PKI Syarif Caropeboka. Ia dokter lulusan UGM tahun 1959 dan kemudia menjadi dokter Rumah Sakit Kotapraja Jakarta. Setelah berusaha menghindari dari tangkapan anggota ABRI selama berbulan-bulan dengan berpindah-pindah tempat, akhirnya tertangkap di Sukabumi pada 30 Mei 1967. Ia digelari 'dokter Lubang Buaya', karena ketika rumahnya digrebek tentara ditemukan sepucuk surat permohonan PKI untuk membuatkan surat ijin tidak masuk bekerja kepada sejumlah anggota PKI yang akan mengikuti pelatihan di Lubang Buaya. Proses pemeriksaan serta pemindahan lokasi penahanan, berlangsung berbulan-bulan hingga akhirnya di bulan Juni 1971 ia dipindahkan ke kamp Plantungan. Tokoh lainnya adalah Mia Bustam, seorang seniman, mantan istri peukis Soedjojono, yang menjadi anggota Lekra. Ia ditangkap pada tanggal 23 November 1965 di rumahnya di pinggir kota Jogja. Anak perempuan tertuanya juga ikut dinaikkan ke truk, namun kemudian dilepas kembali, karena petugas kasihan melihat enam adiknya yang masih kecil tidak ada yang merawat. Mia Bustam dituduh mengikuti latihan di Lubang Buaya (Mia mengaku tidak pernah ke sana, bahkan belum pernah mendengar nama 'Lubang Buaya'. Ia juga dituduh melindungi anggota-anggota PKI dan mengadakan rapat gelap dengan mereka. Setelah ditangkap, diinterogasi, dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, akhirnya Mia juga ditempatkan di kamp Plantungan. Ketika pada tahun 1975 organisasi-organisasi

internasional memaksa Suharto untuk mulai melepas para tapol. Setelah diproses pada tanggal 20 Desember 1976, ke dua orang ini harus menjalani masa rehab terlebih dahulu di penjara Bulu Semarang karena dianggap golongan keras. Setelah bebas, para eks-tapol diminta menandatangani pernyataan tidak akan berpolitik praktis kembali, serta tidak diperkenankan bekerja sebagai PNS, anggota ABRI atau perusahaan vital negara lainnya (BUMN). Karena sulit mencari kerja para eks-tahanan ini umumnya membuka usaha mandiri seperti membuka warung, serta melakukan arisan dan pertemuan dengan sesama tahanan, karena mereka sulit diterima masyarakat umum. Seringkali juga terjadi pernikahan di antara para bekas tahanan dan keturunannya. Untuk waktu yang lama mereka tetap dikucilkan masyarakat dan dipersulit dalam urusan identitas mereka.

Pasca Reformasi '98 politisasi ideologi masih terus berlaku. Ahmad Dhani, musisi yang kemudian aktif dalam politik ini ditangkap polisi dengan beberapa tuduhan. Ketika ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik, Ahmad Dhani menyatakan bahwa telah terjadi kriminalisasi politik atas dirinya (news.detik.com, Kamis 18/10/2018). Dhani ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik akibat cuitannya di Twitter saat akan melaksanakan kegiatan '#ganti presiden 2019' di Surabaya. Selain itu ada tuduhan makar bersama Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, dkk. (nasional.kompas.com, 3 Desember 2016), tuduhan pencemaran nama baik terhadap Basuki Tjahaja Purnama, dan 2 tuduhan lainnya. Ratna Sarumpaet menjadi terdakwa kasus pembohongan publik, sekalipun menurut Ratna sendiri, dia sebagai *public figure* yang berpihak kepada lawan politik pemerintah, dianggap mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan. "Ratna menurut pengacaranya juga menganggap kasusnya dipaksakan untuk membungkam sikapnya yang sering mengkritik pemerintah". (BBC News Indonesia, 11 July 2019). Pada dasarnya lawan-lawan politik pemerintahan yang berkuasa saat ini, dan vokal serta aktif

mengorganisir kegiatan yang dianggap mengancam eksistensi pemerintahan dan ideologi negara, banyak yang ditangkap karena beragam tuduhan yang berbeda, yang tidak selalu langsung terkait dengan ideologi negara.

HTI sebagai organisasi massa dianggap memiliki azas dan ideologi yang bertentangan dengan azas dan ideologi negara NKRI, dan karena itu dinyatakan dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Juli 2017 (sesuai Perppu no.2 tahun 2017) dan menjadi organisasi terlarang di Indonesia. Kebijakan tegas pemerintah ini diambil sesuai jalur hukum yang berlaku. Untuk analisis permasalahan yang pertama kali dilakukan dengan caramelihat bagaimana pemerintahan di nusantara dalam lintasan sejarah menangani politisasi ideologi. Dalam *Penelitian dan Penulisan Sejarah Boven Digoel, buku satu: perpektif sejarah* (Kampen, 1975: 48) dijelaskan bahwa:

'Pemerintahan Gubernur Jendral Van Limburg Stirum disebut oleh Sartono sebagai pemerintahan yang toleran terhadap perkembangan politik di Hindia Belanda. Kepemimpinan yang toleran dan mulai berkembangnya ide sosialis dan komunis merupakan perpaduan yang menarik dalam konteks pergerakan yang bersifat anti kolonialis. Perkembangan yang demikian akhirnya memunculkan radikalisme dalam dunia politik Hindia Belanda'.

Pendirian berbagai organisasi di Indonesia pada awal abad ke-20 dimulai dengan organisasi-organisasi yang bersifat pendidikan, kedaerahan, keagamaan serta perekonomian yang umumnya berpandangan moderat. Radikalisme dimulai dengan *Indische Partij* (IP) di tahun 1912 oleh Douwes Dekker yang berazaskan nasionalisme. Namun setelah Douwes Dekker, Suwardi Suryadinigrat dan dr. Tjipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda, organisasi ini surut. Sebelumnya telah muncul *Perhimpunan Indonesia* (PI) pada tahun 1908 yang didirikan pemuda-pemuda Indonesia di negeri Belanda, seperti Sutan Kesjangan dan R.M. Noto Suroto yang kemudian orientasi

politiknya berkembang menjadi nasionalis-demokratis yang non-kooperatif.

Gerakan ini kemudian berkembang di Indonesia sejak dibawa masuk pada tahun 1921 oleh A. Subardjo dan Moh. Hatta. Di Indonesia marxisme juga mulai berkembang. Faham ini terutama dikembangkan oleh Sneevliet seorang pemimpin partai buruh di Belanda, yang datang ke Indonesia. Sneevliet mula-mula bekerja sebagai staf redaksi surat kabar *Surabajaasch Handelsblad*, lalu pindah ke Semarang sebagai sekretaris *Semarangse Handelsvereniging*, dimana ia mendirikan organisasi *Indische Sociaal Democratische Verenging* (ISDV) pada tahun 1914. ISDV inilah yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Anggota ISDV ini mulai menyusupi Sarekat Islam di tahun 1916, serta aktif melakukan propaganda melawan kapitalisme Belanda.

Sejak itu pemerintah Hindia Belanda mulai disibukkan dengan berbagai kritik dan penentangan yang memuncak pada tahun 1926 dan 1927 dengan terjadinya pemberontakan kelompok komunis di daerah Banten dan Silungkang, Sumatra Barat. Gerakan ini terorganisir dan terjadi di banyak tempat, dan karena itu dianggap sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban (Bloembergen, 2011:329). Pemerintah Hindia Belanda mulai bertindak keras, karena kesulitan menangani orang-orang yang memiliki ideologi yang dianggap merugikan pemerintah.

Para tahanan ini tidak dapat lagi diasingkan ke negeri Belanda karena justru di Belanda pemuda-pemuda ini menyerap pemikiran-pemikiran yang radikal, oleh sebab itu J.J. Schriekke, perwakilan pemerintah untuk urusan umum di *Volksraad* pada tahun 1925 melemparkan ide untuk menciptakan suatu tempat terpencil dan terkungkung alam, dimana para ekstrimis ini dapat hidup 'bebas' memikirkan ide-idenya tanpa mengganggu pemerintah dan masyarakat lainnya. Pemerintahan yang saat itu telah beralih ke tangan Gubernur Jendral De Graeff kemudian mewujudkan ide ini dan menyiapkan suatu tempat khusus untuk mengasingkan orang-orang yang dinilai radikal tersebut.

Kamp Boven Digoel yang pelaksanaan pembangunannya ditugaskan kepada Kapten L.Th. Becking, merupakan kamp ideal dengan penjagaan minim, karena letaknya terpencil, dikelilingi hutan rimba yang ganas, serta dihuni penduduk lokal yang sebagian masih kanibal. Fakta ini menyebabkan sejumlah usaha pelarian gagal atau tidak diketahui hasilnya. Kamp Boven Digoel ini dianggap cocok untuk melakukan pengasingan massal, karena ideal dalam mengisolasi, lagipula sangat ekonomis.

Para tahanan komunis yang ditangkap dalam jumlah besar ini kemudian, setelah diadili dan dianggap berideologi ekstrim, mereka dibuang ke kamp Boven Digoel. Dalam tahap pertama ini mencakup lebih dari 1000 orang, yang kemudian bertambah dengan tahanan dari pemberontakan Silungkang, 1927 dan Sawahlunto, 1928, hingga mencapai lebih dari 2000 orang. Mereka diasingkan ke sana dengan menggunakan dasar hukum *Indische Staatsinrichting 1925* pasal 37 ayat 1 (Penelitian, 2012: 59-65). Peraturan ini dikenal dengan nama: *exorbitante rechten*, yang oleh Gubernur Jendral dapat diterapkan kepada siapa saja yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Chalid Salim adalah salah satu yang terjaring dengan peraturan ini. Tempat yang awalnya diperuntukkan bagi tahanan komunis ini, dalam periode berikutnya dimanfaatkan menjadi pengasingan para tokoh nasionalis demokratis, seperti Moh. Hatta dan Tjipto Mangoenkoesoemo.

Kasus dr. Schoonheydt juga kasus ideologi, namun tidak sama dengan kasus Chalid Salim yang meyakini perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui ideologi komunis. Schoonheydt pada dasarnya seorang kolonialis tulen, namun ia kritis terhadap sejumlah tindakan pemerintah yang dianggapnya kurang tepat, atau membahayakan eksistensi pemerintahan kolonial itu sendiri. Bukunya *Boven Digoel* menunjukkan pandangannya sebagai pendukung politik kolonial yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda. Hanya kejujurannya dalam menulis membuat ia juga membukakan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum HAM internasional.

Schoonheydt dalam bukunya maupun secara umum, tidak berbeda dari sebagian besar orang Belanda yang tumbuh besar di Hindia Belanda. Ia bekerja untuk dan membela kepentingan politik pemerintahan kolonial Belanda. Namun memberitakan pengasingan massal di tanah terisolir alam, bukan iklan bagus di dunia internasional. Sebaliknya tahanan yang membaca buku *Boven Digoel* juga kecewa dengan pandangan Schoonheydt yang ternyata membela pemerintah kolonial. Mereka membakar bukunya sebagai tanda kesal, sedangkan Chalid Salim yang merasa Schoonheydt mengkhianati usaha perlawanan bangsa pribumi untuk merdeka, kelak melawan dan mendebat pandangan Schoonheydt melalui buku memoarnya.

Schoonheydt menjadi anggota NSB-Hindia Belanda karena percaya bahwa organisasi ini membawa dampak positif bagi pemerintahan kolonial Belanda. Ia bahkan membawakan sejumlah pandangannya dalam pertemuan-pertemuan NSB di Hindia Belanda maupun negeri Belanda. Sayangnya ketika organisasi ini jelas menampakkan perubahan haluan dan menjalankan ideologi yang negatif, Schoonheydt sekalipun curiga namun tidak bersikap tegas. Ia terpedaya oleh Mussert dan tidak jadi keluar dari organisasi. Baru ketika situasi telah gawat dan ia diperintahkan mengundurkan diri pada tanggal 22 April 1940, ia segera melakukannya.

Hanya sekitar 2 minggu kemudian, pada tanggal 10 Mei, tentara Jerman menduduki negeri Belanda, sehingga seluruh situasi di negeri Belanda, tetapi juga di Hindia Belanda, berubah total. Schoonheydt semula tidak terlalu merasa khawatir, karena Perdana Menteri Belanda De Geer dalam pidato radionya di bulan April 1940 menekankan bahwa ada kebebasan untuk setiap aliran politik yang dijamin oleh UUD Belanda, dan bahwa setiap warga negara Belanda tentunya memiliki kebebasan untuk memilih partai/kelompok yang sedang saling memperebutkan pengaruh tersebut. Sedangkan Gubernur Jendral Tjarda van Starckenborgh, pemimpin tertinggi di Hindia Belanda pada tanggal 23 April 1940 dalam pidato radionya masih berkata (1975:170): “Apakah benar,

bahwa kita sudah harus merasa terancam dan dengan demikian mencurigai banyak warga kita (maksudnya anggota NSB-Hindia Belanda), yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup tenang dan damai di antara kita?”. Pada hari itu juga, bukan hanya orang Jerman, tetapi juga semua anggota NSB, bahkan simpatisan dan ex-NSB ditangkap dan menjadi tahanan, tanpa melalui proses pengadilan yang normal. Enam tahun tiga bulan lamanya Schoonheyt menjadi tahanan, dan tidak pernah diadili. Berulang kali ia sebagai tokoh masyarakat di bidang medis yang telah bekerja dan berjasa bagi pemerintah dan masyarakat Hindia Belanda menulis surat permohonan kepada para pemimpin pemerintahan yang umumnya ia kenal secara pribadi agar kasusnya diperiksa dan diberi keadilan, namun semuanya sia-sia.

Sikap pemerintah dalam menangani G30S adalah penanganan berdasarkan kebijakan militer. Supersemar telah memberikan kewenangan kepada Letjen Suharto, panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa G30S. Dengan demikian kekuasaan pemerintahan sipil yang sah pada masa itu telah dialihkan dari tangan Presiden Sukarno ke tangan Letjen Suharto yang kemudian menangani pembubaran PKI dengan kekuatan dan kebijakan militer, dimana semua orang yang dianggap terlibat dalam gerakan PKI dan G30S dalam waktu singkat ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Karena banyaknya orang yang dianggap terlibat ini, maka pada akhirnya proses penangkapan dan pemeriksaan banyak yang tidak akurat, dilakukan melalui intimidasi, tuduhan yang tanpa bukti dan mendasar, paksaan dan siksaan agar mengaku, atau bahkan dengan mengambil jalan pintas tanpa proses, sehingga banyak yang tanpa melalui proses hukum dan pengadilan dibunuh atau dijebloskan ke dalam penjara selama bertahun-tahun.

Dalam acara *Kick Andy* dengan anggota paduan suara *Dialita*, terlihat bahwa sekalipun ibu-ibu ini dahulu memang menjadi anggota organisasi *Pemuda Rakyat* yang merupakan ‘*onderbouw*’ dari PKI, namun menurut pengakuan mereka, pada dasarnya mereka sendiri tidak memiliki pandangan

politis yang didasarkan atas ide komunisme. Mereka hanyalah korban sampingan perkembangan politik, karena tidak membaca tanda-tanda jaman dan bersifat polos serta kurang mencari tahu. Di kamp wanita Plantungan (ada sekitar 500 tahanan) juga dapat ditemui dua kelompok. Pertama, mereka yang menjadi korban sampingan karena memiliki hubungan dengan orang lain memang terlibat gerakan PKI (Ratih, karena suaminya Oloan Hutapea anggota politbiro CC PKI, atau istri dari Nyono, ketua SOBSI), atau bahkan karena salah tangkap karena kebetulan memiliki nama yang sama, seperti Sumilah yang baru berusia 14 tahun.

Kedua, yaitu anggota PKI yang aktif serta memiliki pendidikan dan kedudukan tinggi dalam keorganisasian (tapol B), seperti dr. Sumiyarsi (anggota dewan eksekutif HSI), Umi Sarjono (ketua Gerwani), Mia Bustam (ketua Lekra), Salawati Daud (anggota DPR fraksi PKI dan anggota Gerwani), Sri Kayati, yang sekalipun bangsawan tetapi karena dia anggota Lekra dan CGMI Surakarta, serta memiliki suami (Rewang) anggota CC PKI, pada akhirnya ditempatkan di kamp Plantungan. Tahanan di kamp Plantungan umumnya ditangkap pada tahun 1965-1967, ditahan di berbagai tempat hingga dipindahkan ke Plantungan di tahun 1971, dan akhirnya dibebaskan mulai tahun 1975-1977.

Para wanita yang ikut Gerwani (atau dituduh ikut) ini digambarkan secara sangat negatif dalam media surat kabar dan majalah di masa Orba. Ini menimbulkan imej dan konotasi kejam, kotor dan rendah, yang membuat mereka pun diperlakukan demikian oleh orang lain. Film ‘Janur Kuning’ yang wajib diputar setiap tahun berfungsi untuk tetap memelihara imej ini. Dalam suasana *chaos* sebagai dampak G30S, dan dengan adanya pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban di tangan militer, tak dapat dicegah lagi bahwa banyak sekali korban yang jatuh, baik mereka yang dieliminasi secara langsung, maupun yang ditangkap tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya, sehingga banyak pula jatuh korban yang tak bersalah. Peraturan, kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan banyak merupakan produk dadakan yang tidak akan terbit dalam situasi normal.

Baik dalam periode kolonial pada awal abad ke 20, maupun pada awal periode Orde Baru ini, tindakan-tindakan pemerintah umumnya tidak transparan. Kebijakan yang dijalankan dapat bersifat lokal dan kasuistik, tanpa konsekuensi hukum bagi pelaksana kebijakan tersebut, karena dianggap telah sesuai dengan kepentingan umum pemerintah yang berkuasa. Dengan paksaan dunia internasional, para tahanan ini mulai diproses untuk dilepaskan, namun dalam prakteknya mereka menjadi warga negara kelas dua yang dikucilkan masyarakat dan tidak dibela hak-haknya oleh negara, bahkan dipersulit karena dianggap telah mengkhianati ideologi negara. Juga mereka yang tertahan di luar negeri, hingga sekarang mengalami kesulitan untuk kembali.

Pasca reformasi dan memasuki abad ke 21, banyak perubahan yang telah terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan di Indonesia. Rezim militer Orde Baru telah tumbang, dan demokrasi Pancasila kembali berusaha ditegakkan. Dunia internasional ikut memperhatikan usaha pemulihan situasi pasca reformasi yang dipenuhi kerusuhan, pembakaran, perkosaan, dan anjloknya perekonomian bangsa. Secara lambat dan bertahap Indonesia memasuki tahap pemerintahan yang lebih stabil dan maju. Di dunia internasional komunisme runtuh bersama dengan bubarnya Uni Sovyet, sebaliknya aliran-aliran dalam agama Islam dan Kristen semakin berkembang mengikuti globalisasi.

Radikalisme semakin tajam, bahkan terjadi terorisme melalui bom-bom bunuh diri di dunia internasional, termasuk di Indonesia. Pemerintah terpaksa meningkatkan kewaspadaan melalui aparat kepolisian dan militer. Di bidang ekonomi Indonesia juga berusaha bertahan melalui bantuan IMF, namun masa ini cukup sulit, sementara korupsi yang telah membudaya semakin merajalela. *Nation building*, nilai-nilai budaya tradisional, bahkan pengetahuan dan penghayatan akan ideologi Pancasila semakin tipis.

Ideologi global yang berorientasi kapitalisme konsumtif dan individualistis, aliran kepercayaan yang semakin radikal

seperti ISIS terkait pemerintahan khilafah global bertaraf internasional, merasuki dan menyusup masuk ke dalam kehidupan beragama di Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan mulai berubah, dan pemerintah yang mulai sadar melihat kemunduran mental dan moral bangsa ini mulai berusaha keras mengatasi permasalahan yang ada.

Korupsi berusaha dibenahi, peraturan terkait kebebasan berekspresi mulai ditata, radikalisme agama berusaha dikekang dan diarahkan kembali ke jalur yang benar, pemahaman ideologi bangsa berusaha dimasukkan kembali sebagai bagian dari dunia pendidikan. Melalui KPK dunia jalur korupsi yang sudah membudaya, terutama di tingkat atas, baik di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif berusaha diatasi, birokrasi administrasi disederhanakan, namun itu semua tidak mudah dan mendapat tantangan terutama dari kalangan yang selama ini mendapatkan keuntungan dari situasi yang ada.

Di tengah situasi ini pemilihan kepala daerah, lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden memasuki tahapan-tahapan baru. Kebebasan berbicara, akses media sosial yang semakin mudah dan global, semua membawa perubahan yang terkadang kurang terkendali.

Dalam situasi dan kondisi seperti inilah kemudian terlaksana pilgub DKI 2017 dan pileg /pilpres 2019, dimana kemudian masyarakat dapat melihat sejumlah peristiwa hukum dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pembahasan ini kami hanya memilih 2 contoh perkara yang menyangkut selebriti nasional yaitu musisi Ahmad Dhani serta seniman Ratna Sarumpaet, serta peristiwa dibubarkannya HTI sebagai contoh.

Hal mencolok yang berbeda dengan sebelum periode reformasi, adalah usaha meredam permasalahan politisasi ideologi ini melalui jalur hukum yang formal dan transparan, namun tentunya dengan tetap menggunakan lengan-lengan kekuasaan para penegak hukum dan keamanan yang resmi. Penerapan hukum yang dilakukan pun selalu diusahakan berada dalam koridor hukum internasional dan sesuai dengan azas HAM yang berlaku. Dengan demikian pemerintahan

tak dapat dipersalahkan dalam melakukan tindakan ‘politisasi’ atau ‘kriminalisasi’ terhadap lawan politiknya.

Saat ini pemerintah tampak cukup cerdas dan cermat dalam usahanya mengantisipasi berbagai kegiatan dan organisasi yang tidak seide dengan pemerintah, walaupun penanganan yang dilakukan masih sangat berhati-hati untuk menghindari tuduhan-tuduhan seperti yang memang dilontarkan oleh beberapa pihak.

Dalam penanganan politisasi ideologi, peran media selama ini sangat besar dan distingtif. Media massa merupakan salah satu sarana yang efektif yang bisa digunakan seseorang untuk meyakinkan orang lain berkaitan dengan ideologi dan pandangan yang dimilikinya. Pada masa lalu media tersebut umumnya dalam bentuk tulisan, berupa buku, artikel surat kabar ataupun lisan, dalam bentuk pidato di depan umum, di radio/ televisi. Di masa kini kita juga mengenal adanya media sosial, dan sarana serta prasarana komunikasi lain yang jauh lebih canggih dan cepat dibandingkan dengan masa lalu. Kejatuhan Schoonheyt berawal dari karyanya *Boven Digoel* yang walaupun umumnya mendapat resensi positif, namun karena satu dua orang tokoh mengkritisnya secara negatif, dampaknya menjadi negatif.

Berbagai tulisan dan pidato yang disampaikannya terkait bukunya, serta pandangan-pandangan politisnya menguatkan pendapat bahwa ia seorang kolonialis tulen, tetapi juga kritis terhadap pemerintah. Sedangkan keanggotaannya di NSB yang tidak disertai kewaspadaan akan perubahan kebijakan di dalam organisasi, serta sikap abai membaca tanda-tanda jaman, membuatnya terjungkal dari kehidupan mapannya. Keyakinannya akan pidato radio pimpinan pemerintahan, bujukan tokoh organisasi, membuatnya tidak mengambil tindakan tegas dan cepat, sehingga kelalaiannya ini harus ia bayar mahal.

Penggunaan media surat kepada pimpinan pemerintahan yang birokratis selama masa penahannya tidak membawa hasil yang diharapkan, sekalipun pada akhirnya ditujukan kepada pihak yang memang bertanggungjawab (pemerintah Hindia

Belanda), dan pada saat yang tepat (tepat sebelum hasil KMB – Desember 1949 membubarkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda), menyetujui proses rehabilitasi nama Schoonheyt.

Sebaliknya Chalid Salim secara sadar dan positif telah menggunakan media untuk menyampaikan keyakinannya dengan sadar akan konsekuensinya. Baik tulisan dan kritiknya terhadap pemerintah kolonial, maupun memorinya selama 15 tahun di kamp Boven Digoel digunakannya untuk sekali lagi menguraikan hak kemerdekaan bangsa serta pribadi-pribadi yang dikungkung pemerintah kolonial, serta pembenaran atas tindakannya di masa lalu terhadap ideologi kolonialisme, termasuk pemikiran Schoonheyt yang dianggapnya salah di masa itu. Para tapol PKI dari kelompok *Dialita* di penjara Bukitduri, umumnya menjadi korban promosi kegiatan ‘*onderbouw*’ partai di bidang lain, tanpa menyadari keterlibatan organisasi tersebut dalam kegiatan politik.

Tentang G30S serta peran *Gerwani* dan anggota organisasi PKI lainnya umumnya di-*blowup* media surat kabar dan majalah, sehingga para wanita ini digambarkan begitu sadis dan tak tahu malu, yang menyebabkan mereka dibenci dan direndahkan oleh masyarakat, termasuk militer dan petugas yang kemudian memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi. Nasib mereka dan para tapol B di Plantungan serta banyak korban G30S lainnya umumnya ditulis oleh pihak ketiga, dengan materi hasil wawancara pengalaman mereka.

Namun banyak juga wawancara yang kini dilakukan oleh media televisi seperti pada acara *KickAndy*, yang berusaha meluruskan sejarah dan merehabilitasi nama dan kondisi mereka. Demikian juga banyak tulisan sejarah, biografi, memoar, bahkan karya sastra yang memberikan gambaran kehidupan mereka dari segi kemanusiaan, bukan ideologis.

Di masa sekarang media sosial menjadi lahan penyampaian pendapat dan pandangan secara luas kepada banyak pihak, yang seide ataupun tidak. Daya jangkauan yang luas, kebebasan menyatakan pendapat, menjadikan medsos sebagai media yang berguna tetapi juga berisiko, karena dengan

perkembangan negatif penggunaan media untuk menyampaikan juga kabar bohong (hoax) menyebabkan pemerintah mulai turuntangan membatasi dan memberikan sanksi kepada penyalah-gunaannya. Begitu juga media televisi, video, perekam, alat komunikasi seperti hp dan gadget lainnya, selain dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berita, juga merupakan arsip dan bukti otentik (selama tidak direkayasa) yang dapat memperlihatkan wajah, setiap tindakan, memperdengarkan suara dan setiap kata, yang dapat menjadi alat bukti dari apa, siapa dan bagaimana sesuatu telah terjadi, terutama tindakan radikal, terlebih jika berbentuk terorisme.

Inilah yang terjadi pada kedua tokoh selebritis kita. Alat yang membuat mereka populer, juga menjadi alat yang menjatuhkan mereka. Sebaliknya jika terkait HTI, yang terutama menegaskan pemerintah untuk melarang mereka memang adalah azas ideologi mereka yang tercatat dalam AD/ART. Kegiatan para anggota yang terekam dalam media massa mungkin juga ikut mendukung pemerintah dan pihak pengadilan dalam memutuskan vonis mereka.

PENUTUP

Dalam perjalanan sejarah suatu negara, berulang kali terjadi peralihan kekuasaan pemerintahan, yang sering kali membawa ideologi yang berbeda. Dalam setiap fase, para elit politik berinteraksi dengan warganya, dengan menggunakan cara yang berbeda sesuai ideologi yang dianutnya. Media cetak dan elektronik, media massa dan media sosial, menjadi wadah legitimasi politik dalam rangka melanggengkan opini penguasa. Namun penantang penguasapun dapat menggunakannya untuk menyebarkan paham yang diinginkannya. Media dapat pula menjadi sumber arsip bukti yang otentik dan absah untuk tindakan hukum.

Dalam menjalankan legitimasinya sebagai penguasa, seperti yang tampak dalam uraian di atas, kekuasaan tersebut dapat menyebabkan hilangnya kebebasan seseorang atau suatu golongan. Dapat pula terjadi bahwa

mereka yang tidak tahu menahu persoalan elit yang terjadi, namun ia menjadi tumbal situasi yang keos. Keterlibatannya hanya didasarkan pada daftar nama keanggotaan salah satu organisasi tanpa perlu pembuktian keterlibatan kasus yang mendalam. Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan seseorang apabila ingin masuk dalam wadah suatu organisasi politik maupun sosial. Penangkapan seseorang dengan alasan politisasi ideologi dapat menimpa siapa saja, dari latar belakang mana saja, dan kapan saja: tokoh sosial masyarakat, selebriti, akademisi, bangsawan, hingga anak SMP. Dampak penangkapan dalam politisasi ideologi sangat buruk dan dalam, dan sekali terlibat dalam masalah ini, kehidupan normal dan baik seperti semula tak akan pernah dapat diraih kembali sepenuhnya.

Bila seseorang atau suatu kelompok memang meyakini kebenaran suatu ideologi yang mungkin bertentangan dengan ideologi yang berlaku umum di sekelilingnya atau dimiliki oleh penguasa di atasnya, maka ia juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam hal ini kecerdikan dan kecerdasan, serta kecermatan membaca tanda-tanda jaman sangat diperlukan jika berharap tidak terjerat dalam tindakan yang dapat menyeretnya ke dalam kehidupan sengsara untuk waktu yang cukup lama. Karena bukan hanya perbedaan ideologi itu yang dapat menjatuhkan, melainkan apa saja yang salah dilakukan, sekalipun itu hanya tindakan sepele.

Setiap pemerintahan selalu akan berusaha melindungi tatanan pemerintahannya menghadapi goncangan keamanan dan ketertiban yang dianggap cukup mengancam dengan mengambil langkah-langkah yang dimulai dengan jalan persuasif dan secara represif, namun jika ancaman itu semakin nyata dan intens, akan diambil langkah-langkah yang lebih tegas dan keras. Namun penanganan yang dilaksanakan haruslah memenuhi peraturan dan hukum yang berlaku, sekalipun jika perlu memang akan dikeluarkan peraturan baru yang memberikan kewenangan tambahan kepada penguasa untuk melegalkan tindakan dan kebijakan yang diambil.

Penetapan dan penerapan aturan dan hukum harus berada dalam koridor tatanan

hukum internasional, agar tidak menjadi sorotan dan berada di bawah tekanan dunia internasional. Pemerintahan yang baik, sudah akan mulai menangani permasalahan politisasi ideologi ini semenjak nampaknya gejala-gejala awal adanya gangguan keamanan dan ketertiban.

Kecermatan, kewaspadaan dan kehati-hatian dalam mempelajari gejala yang muncul, serta langkah-langkah yang harus diambil akan menentukan besar dan beratnya permasalahan yang dapat muncul kemudian. Sangat penting untuk mempersiapkan perangkat hukum, serta kepastian adanya kerja sama dengan aparat keamanan dan hukum dalam menghadapi peristiwa-peristiwa besar.

Peran media massa, khususnya kini juga media sosial, sangat berpengaruh dalam permasalahan politisasi ideologi ini, baik bagi pihak yang memiliki ideologi dan tujuan yang berbeda, maupun oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Hoax harus selalu diantisipasi secara tegas. Penyebaran nilai-nilai positif dari ideologi yang diyakini dan dipegang pemerintah harus senantiasa disebarluaskan dari waktu ke waktu, pun pada masa tenang, dan terutama juga dalam membina generasi muda.

Pengawasan dan pengarahan penggunaan media massa harus dilaksanakan secara cermat dari waktu ke waktu kepada semua golongan, dan harus selalu dipersiapkan peraturan dan undang-undang yang aktual dan mengikuti perkembangan jaman untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

Hoax saat ini dapat dengan mudah ditelusuri dan dibuktikan, sekalipun terkadang tetap dimanfaatkan dengan harapan tetap membawa efek terhadap sasarannya/masyarakat luas.

Media sosial dan media massa dapat menjadi alat komunikasi dan promosi yang canggih untuk menyampaikan pandangan dan pendapat seseorang dalam jangkauan yang luas, sehingga sangat efektif jika digunakan secara tepat. Namun media ini juga dapat menjadi bumerang bagi mereka yang melakukan kesalahan sekecil apapun, karena dapat merupakan alat bukti dan arsip yang canggih untuk menjatuhkan seseorang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Abd Rasyid Asba M.A. alm. yang telah membantu penulis dalam meminjamkan beberapa sumber dan koleksi arsip beliau terkait penelitian Kabupaten Boven Digoel dan politik kolonial pemerintah Hindia Belanda yang menimbulkan ide penulisan ini.

Kami berterima kasih juga kepada teman sejawat di negeri Belanda, ibu Pattynama yang telah menelusuri dan mengirimkan buku asli Anthony van Kampen. *Een Kwestie van Macht* (1975), demikian juga rekan sedepartemen Dr. Rahman Hamid, MHum. yang menghadiahkan kami copy buku Chalid Salim *Limabelas Tahun Digul, Kamp konsentrasi di Nieuw Guinea, tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia* (1977).

Terima kasih tak terhingga juga kepada Husnul Fahima Ilyas, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis terkait pengembangan tulisan. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia Seminar Internasional BPNB yang telah mengundang dan menikutsertakan kami dalam forum-forum akademik sehingga penulis dapat mempresentasikan tulisan ini di forum ilmiah, seminar Internasional "Conflict and Violence, Historical Reconstructions and Cultural Resolution" pada 27-29 Agustus 2019, dan mendapat penawaran untuk diterbitkan dalam Jurnal Al Qalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumbergen, Marieke. 2011. *Polisi Zaman Hindia Belanda dari Kepedulian dan Ketakutan*.
- Terj. Tristam P. Muliono, dkk. Jakarta: Kompas & KITLV-Jkt.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Djahiri, Kosasih (dkk). *Ilmu Politik dan Kenegaraan*. Edisi 1. Universitas Terbuka.

- Faridah, Siti dan Jerico Mathias.2018. “Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu” dalam: Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 4 no. 3 / 2018.
- Hamid, Abd. Rahman & Muhammad Saleh Madjid. 2011. Pengantar Ilmu Sejarah. Jogyakarta: Ombak.
- Kampen, Anthony van. 1975.Een Kwestie van Macht (Persoalan Kekuasaan). Bussem: Unieboek BV.
- “Kasus Makar Sri Bintang, Polisi Cekar Ratna Sarumpaet Cs”, oleh: Tempo.co, Rabu 21 Desember 2016, 21:36 WIB. National.tempo.co/read/829620/kasus-makar-sri-bintang-polisi-cecar-ratna-sarumpaet-cs.
- “Lagu Yang Tak Lagi Bisu”, Kick Andy Show 3 Mei 2019, pk. 20.30 WIB, Metro TVNews.Com, 2019.
- Lestariningsih, Amurwani Dwi. 2011. Gerwani. Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan. Jakarta: Kompas.
- Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial. Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Penelitian dan Penulisan Sejarah Boven Digoel. Buku Satu: Perspektif Sejarah.(t.t.).Pemda Kabupaten Boven Digoel, kerjasama dengan Puslitbang Kebijakan dan Manajemen LP2M Universitas Hasanuddin.
- Rambe, Martin. “Politisasi Birokrasi di Indonesia”, Kompasiana.com. <http://www.kompasiana.com/marten-rambe/politisasi-birokrasi-di-indo...>, 8 Mei 2013.
- “Ratna Sarumpaet divonis 2 tahun pidana penjara terbukti bersalah berbohong dan bikin onar”, BBC News Indonesia, dalam bbc.com/indonesia/indonesia-48946433.
- Runciman, David. 2012. Politik Muka Dua. Topeng Kekuasaan dari Hobbes hingga Orwell. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim Agus. 2002 Perubahan Sosial. Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia. Yogya: Tiara Wacana.
- Salim, Chalid. 1977. Limabelas Tahun Digul, Kamp konsentrasi di Nieuw Guinea, tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia. Terj. Hazil Tanzil dan J. Taufik Salim. Jakarta: Bulan Bintang. (Judul aslinya: Vijftienjaar Boven Digoel. Concentratiekamp in Nieuw Guinea: bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid).
- Schoonheydt, dr. L.J.A. 1936. Boven Digoel, Batavia: De Unie.
- Shiraishi, Takashi. Hantu Digul: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial, terj. Endi Haryono, Nicolaus Loy, Nur Khoiron. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
- “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indie” (“Indische Staatsregeling 1925”), dalam: Regerings Almanak, 1927.

